



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
ASISTEN DEPUTI KERJA SAMA EKONOMI MULTILATERAL
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ferry Ardiyanto

Jabatan : Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Edi Prio Pambudi

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

Pihak Kedua,

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama
Ekonomi dan Investasi

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi
Multilateral

Edi Prio Pambudi

Ferry Ardiyanto

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
ASISTEN DEPUTI KERJA SAMA EKONOMI MULTILATERAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya Dukungan pada Tahapan Akses Indonesia ke OECD	1.1	Persentase Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses reuiu dari Komite OECD	30%
2.	Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi	2.1	Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Multilateral melalui Jumlah Komitmen Forum Sherpa G20	90%
		2.2	Tingkat Efektivitas Implementasi Proyek <i>Joint Crediting Mechanism</i> (JCM) dan <i>Asia Zero Emission Community</i> (AZEC)	90%
3.	Terwujudnya Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral	3.1	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses reuiu dari Komite OECD dalam rangka akses Indonesia ke OECD	90%
		3.2	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan pada Pertemuan Sherpa Track G20 terhadap Pencapaian Hasil Strategis untuk Kepentingan Nasional	85%
		3.3	Persentase efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kesepakatan Pembangunan Harmonisasi Kebijakan Energi Bersih pada <i>Joint Crediting Mechanism</i> (JCM) dan <i>Asia Zero Emission Community</i> (AZEC)	85%
4.	Terwujudnya Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral	4.1	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral	3 dari 4
5.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang Profesional	5.1	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral	92%

Program : Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

Kegiatan

1. *Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral*

Total

(Empat milyar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah)

Anggaran

Rp. 4.236.257.000,-

Rp. 4.236.257.000,-

Pihak Kedua,

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi



Edi Prio Pambudi

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral



Ferry Ardiyanto

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI KERJA SAMA EKONOMI MULTILATERAL KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	KODE IKU: 1.1
---	--------------------------

Sasaran Strategis	SS.1. Terwujudnya Dukungan pada Tahapan Akses Indonesia ke OECD
Deskripsi Sasaran Strategis	<p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2029, proses akses OECD Indonesia dilakukan dalam rangka mempercepat transformasi Indonesia yang terdiri atas transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola melalui keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional. Dalam kerangka tahapan akses yang ditetapkan oleh OECD, penyusunan dan penyampaian dokumen <i>Initial Memorandum</i> merupakan bagian krusial dari proses awal akses setelah penyusunan peta jalan.</p> <p>Proses ini meliputi pelaksanaan penilaian mandiri (<i>self-assessment</i>) terhadap kesesuaian kebijakan dan praktek Indonesia dengan standar dan instrumen OECD, serta penyusunan dokumen <i>Initial Memorandum</i> yang mencerminkan komitmen dan kesiapan Indonesia dalam proses menjadi anggota OECD. Pemenuhan pelaksanaan penilaian mandiri dan penyampaian dokumen tersebut menjadi indikator penting dalam mengukur kemajuan Indonesia dalam proses akses dan menunjukkan keseriusan serta kesiapan teknis dalam menjawab ekspektasi Komite OECD dalam tahap evaluasi teknis berikutnya.</p>
Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU 1.1 Persentase Dokumen <i>Initial Memorandum</i> yang selesai proses reviu dari Komite OECD
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Persentase Dokumen <i>Initial Memorandum</i> yang Selesai Proses Reviu dari Komite OECD merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan koordinasi dan pengawalan proses akses Indonesia ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), khususnya pada tahapan evaluasi substansi oleh Komite OECD. Indikator ini menilai sejauh mana dokumen <i>Initial Memorandum</i> (IM) yang telah disampaikan oleh Pemerintah Indonesia berhasil melalui proses reviu teknis dan substantif oleh Komite OECD sesuai dengan mekanisme dan standar yang berlaku dalam proses akses.</p> <p>Dalam kerangka akses OECD, <i>Initial Memorandum</i> merupakan dokumen penilaian mandiri awal yang disusun oleh Pemerintah Indonesia untuk menilai tingkat keselarasan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan praktik nasional dengan instrumen hukum OECD yang relevan. Dokumen ini menjadi dasar bagi Komite OECD untuk melakukan reviu awal, mengidentifikasi area keselarasan maupun kesenjangan kebijakan, serta merumuskan pertanyaan klarifikasi, catatan, dan rekomendasi awal kepada negara aksesionis.</p> <p>Proses reviu oleh Komite OECD mencakup pembahasan mendalam atas substansi <i>Initial Memorandum</i> melalui kajian dokumen, pertukaran pertanyaan dan jawaban (<i>question and answer process</i>), serta diskusi teknis antara Komite OECD dan Pemerintah Indonesia. Dalam tahapan ini, Pemerintah Indonesia, melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga yang difasilitasi oleh Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Sekretariat Tim Nasional OECD, bertanggung jawab untuk menyiapkan klarifikasi, penjelasan tambahan, dan penajaman posisi kebijakan guna mendukung kelancaran proses reviu.</p> <p>Pelaksanaan indikator ini berlandaskan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional OECD yang menetapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua Pelaksana, serta Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 232</p>

	<p>Tahun 2024 tentang struktur pelaksana Tim Nasional OECD dan pembagian bidang kerja sesuai Peta Jalan Akses Indonesia. Dalam struktur tersebut, Sekretariat Tim Nasional OECD berperan mengoordinasikan respons pemerintah terhadap proses reviu Komite OECD, memastikan konsistensi narasi kebijakan, serta memantau progres penyelesaian reviu pada masing-masing bidang Tim Nasional OECD.</p> <p>Persentase capaian indikator ini dihitung berdasarkan tingkat progres penyelesaian substansi dokumen Initial Memorandum dalam proses reviu oleh Komite OECD dibandingkan dengan total target penyelesaian dokumen pada periode pengukuran. Indikator ini mencerminkan efektivitas koordinasi lintas kementerian/lembaga, kesiapan substansi kebijakan nasional, serta kemampuan Pemerintah Indonesia dalam merespons standar dan ekspektasi OECD sebagai bagian dari tahapan kunci menuju keanggotaan OECD.</p>		
	Formula		
	$Capaian = \frac{Progres\ Penyelesaian\ Reviu\ Initial\ Memorandum}{Total\ Keseluruhan\ Proses\ Reviu\ Initial\ Memorandum} \times 100\%$		
	Tujuan		
	<p>Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur tingkat penyelesaian proses reviu dokumen <i>Initial Memorandum</i> oleh Komite OECD sebagai bagian penting dari tahapan awal akses Indonesia ke keanggotaan OECD. Indikator ini mencerminkan efektivitas koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam menyiapkan dan menyampaikan klarifikasi, penjelasan tambahan, serta respons kebijakan atas catatan dan pertanyaan Komite OECD terhadap <i>Initial Memorandum</i> yang telah disampaikan. Pencapaian indikator ini menunjukkan kesiapan substansi kebijakan dan regulasi nasional serta konsistensi posisi Pemerintah Indonesia dalam memenuhi standar dan mekanisme evaluasi OECD sesuai dengan Peta Jalan Akses Indonesia.</p>		
Satuan Pengukuran	Persentase		
Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral		
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral		
Sumber Data	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral		
Tingkat Kendali IKU	(...) High	(X) Moderate	(...) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact	(....) Proxy	(...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(....) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct		(X) Indirect
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize

Periode Pelaporan	(...) Bulanan		(X) Triwulan	(...) Semester	(...) Tahunan
--------------------------	---------------	--	--------------	----------------	---------------

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	30%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	3%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	10%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	20%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	30%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

**ASISTEN DEPUTI KERJA SAMA EKONOMI MULTILATERAL
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

KODE IKU: 2.1

Sasaran Strategis	SS.2.Terwujudnya Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas
Deskripsi Sasaran Strategis	<p>Kerja sama ekonomi multilateral merupakan instrumen strategis dalam memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan berbagai negara mitra melalui forum-forum internasional guna mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. Sasaran strategis ini menekankan pentingnya kesepakatan dan implementasi kerja sama multilateral yang efektif, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan ekonomi Indonesia.</p> <p>Ruang lingkup kerja sama multilateral yang dimaksud mencakup perjanjian kerja sama ekonomi, termasuk di sektor perdagangan dan investasi, dalam kerangka kerja sama multilateral yang berada di bawah pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kesepakatan dalam berbagai forum kerja sama ekonomi multilateral yang dikoordinasikan dan ditindaklanjuti oleh Kemenko Perekonomian, serta pelaksanaan proyek strategis multilateral yang dikoordinasikan bersama kementerian/lembaga dan organisasi lainnya yang terkait.</p> <p>Sasaran strategis ini menunjukkan hasil dari Asisten Deputi Kerja Sama Multilateral dalam menjalankan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dalam bidang kerja sama multilateral. Tujuannya adalah untuk mengakselerasi manfaat nyata dari kerja sama internasional dalam meningkatkan daya saing, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.</p>
Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU 2.1 Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Multilateral melalui jumlah komitmen forum Sherpa G20
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>IKU ini mengukur tingkat efektivitas kerja sama ekonomi multilateral yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Indikator ini mencerminkan keberhasilan dalam mengoordinasikan, menyinkronisasikan, mengendalikan kebijakan, serta menindaklanjuti kerja sama ekonomi multilateral dalam forum Sherpa G20 yang menghasilkan komitmen untuk diadopsi oleh negara anggota G20, serta mendorong pencapaian kepentingan strategis Indonesia di tingkat global. Dalam hal salah satu komitmen tidak dapat dicapai karena alasan di luar kendali, maka capaian dapat digantikan oleh komitmen lain yang relevan dan sepadan dalam kerangka kerja yang sama.</p> <p>Efektivitas kerja sama ekonomi multilateral ini diukur berdasarkan komponen utama dengan pembobotan sebagai berikut:</p> <p>Jumlah Komitmen Kerja Sama Ekonomi Multilateral dalam Forum Sherpa G20 (100%)</p> <p>Komponen ini mengukur jumlah kesepakatan tertulis atau komitmen resmi yang disepakati pada <i>Leaders' Declaration</i> dan/atau forum-forum yang berada di bawah Sherpa Track G20, yang mencerminkan bentuk kerja sama ekonomi multilateral yang mendukung program prioritas nasional. Cakupan kesepakatan tersebut dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, komitmen di bidang perdagangan internasional, fasilitasi investasi lintas negara, dukungan pembiayaan inklusif, ketahanan rantai pasok global, transformasi digital yang adil dan merata, pengembangan infrastruktur berkelanjutan, serta inisiatif transisi energi yang berlandaskan prinsip keadilan iklim.</p>

	<p>Komitmen didefinisikan sebagai pernyataan niat, janji, atau ikrar yang bersifat terpisah, spesifik, disampaikan secara terbuka, dan disepakati bersama oleh para anggota KTT G20, yang menyatakan bahwa mereka akan melakukan tindakan di masa depan untuk menuju, memenuhi, atau menyesuaikan diri guna mencapai suatu target yang telah diidentifikasi.</p> <p>Komitmen yang dimaksud dapat mencakup <i>Leaders' Declaration, Communiqué, Chair's Summary, Joint Declaration, Deliverables</i> konkret lintas sektor, inisiatif kerja sama tematik, atau program lanjutan yang diperoleh melalui rangkaian pertemuan pada Sherpa Track G20 baik dalam bentuk Pertemuan Tingkat Menteri (PTM), <i>Working Groups, Engagement Groups</i>, maupun pertemuan antar pejabat tinggi dan kementerian/lembaga terkait. Kesepakatan ini difasilitasi dan/atau dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian bekerja sama dengan K/L teknis dan perwakilan Indonesia di forum internasional, dengan tujuan akhir mendukung kepentingan pembangunan nasional serta memperkuat posisi Indonesia dalam arsitektur ekonomi global.</p> <p>Penetapan target disusun berdasarkan agenda Presidensi G20 Amerika Serikat pada tahun 2026, di mana Triwulan I merupakan periode persiapan substansi sebelum memulai rangkaian pertemuan Sherpa, kemudian meningkat pada Triwulan II melalui partisipasi aktif dalam Pertemuan Sherpa ke-2 serta <i>working dan engagement group</i> pada Sherpa Track, dilanjutkan pada Triwulan III dengan pelaksanaan Pertemuan Sherpa ke-3 untuk mempersiapkan komitmen kepala negara G20 pada <i>Leaders' Declaration</i>. Seluruh rangkaian koordinasi mencapai puncak pada Triwulan IV, yang mencerminkan finalisasi komitmen pada Pertemuan Sherpa ke-4 dan KTT G20 Presidensi Amerika Serikat, serta pembahasan posisi nasional pada Pertemuan Sherpa ke-1 sebagai upaya memastikan keberlanjutan kepentingan nasional Indonesia pada Forum G20, terutama capaian-capaian Indonesia pada Presidensi G20 2022 lalu.</p> <p>Komponen ini dibobotkan sebesar 100% karena pelaksanaan proses kerja sama ekonomi multilateral dalam forum Sherpa G20 merupakan tugas dan fungsi pokok dari Asdep KSE Multilateral.</p> <p>Target Jumlah Komitmen Kerja Sama Ekonomi Multilateral dalam Forum Sherpa G20 Tahun 2026 sebesar 5 Komitmen, yang merupakan komitmen, diantaranya namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Leaders' Declaration</i> 2. <i>Energy Abundance Working Group's Outcomes</i> 3. <i>Innovation Working Group's Outcomes</i> 4. <i>Trade Working Group's Outcomes</i>, dan 5. <i>Business 20 Communique</i> 	
	Formula	
	$\text{Capaian (\%)} = \frac{\text{Jumlah Komitmen}}{\text{Target Komitmen (5)}} \times 100\%$	
	Tujuan	
	Mengukur Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Multilateral melalui Jumlah Komitmen yang Disepakati	
Satuan Pengukuran	Persentase	
Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral	
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral	
Sumber Data	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral	

Tingkat Kendali IKU	(...) High	(X) Moderate	(...) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact	(....) Proxy	(...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(....) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct	(X) Indirect	
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
Periode Pelaporan	(....) Bulanan	(X) Triwulanan	(....) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	80%	100%	90%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	20%	20%	0%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	50%	50%	30%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	70%	70%	60%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	80%	100%	90%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI KERJA SAMA EKONOMI MULTILATERAL

KODE IKU: 2.2

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Sasaran Strategis	SS.2.Terwujudnya Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas
Deskripsi Sasaran Strategis	<p>Kerja sama ekonomi multilateral merupakan instrumen strategis dalam memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan berbagai negara mitra melalui forum-forum internasional guna mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. Sasaran strategis ini menekankan pentingnya kesepakatan dan implementasi kerja sama multilateral yang efektif, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan ekonomi Indonesia.</p> <p>Ruang lingkup kerja sama multilateral yang dimaksud mencakup perjanjian kerja sama ekonomi, termasuk di sektor perdagangan dan investasi, dalam kerangka Kerja Sama Multilateral yang berada di bawah pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kesepakatan dalam berbagai forum kerja sama ekonomi multilateral yang dikoordinasikan dan ditindaklanjuti oleh Kemenko Perekonomian, serta pelaksanaan proyek strategis multilateral yang dikoordinasikan bersama kementerian/lembaga dan organisasi lainnya yang terkait.</p> <p>Sasaran strategis ini menunjukkan hasil dari Asisten Deputi Kerja Sama Multilateral dalam menjalankan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dalam bidang kerja sama multilateral. Tujuannya adalah untuk mengakselerasi manfaat nyata dari kerja sama internasional dalam meningkatkan daya saing, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.</p>
Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU 2.2 Tingkat Efektivitas Implementasi Proyek <i>Joint Crediting Mechanism</i> (JCM) dan <i>Asia Zero Emission Community</i> (AZEC)
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>IKU ini mengukur tingkat efektivitas komitmen terkait implementasi proyek kerja sama ekonomi multilateral yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan yang mencerminkan upaya untuk mewujudkan kebijakan kerja sama ekonomi multilateral yang efektif, melalui penerjemahan kesepakatan internasional ke dalam bentuk proyek konkret yang memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi hijau, serta percepatan transisi energi bersih di Indonesia.</p> <p>Fokus utama dari pengukuran ini adalah pada dua inisiatif strategis, yaitu <i>Joint Crediting Mechanism</i> (JCM) dan <i>Asia Zero Emission Community</i> (AZEC), yang menjadi bagian dari penguatan posisi Indonesia dalam forum kerja sama multilateral di bidang lingkungan dan energi. Kedua skema ini diharapkan menghasilkan komitmen proyek yang terkoordinasi dengan baik, sejalan dengan agenda pembangunan nasional, dan memiliki kontribusi terhadap target pembangunan rendah karbon.</p> <p>Efektivitas kerja sama ini diukur berdasarkan komponen utama dengan pembobotan sebagai berikut:</p> <p>Jumlah Proyek Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang Terimplementasi melalui JCM dan AZEC (100%)</p>

	<p>Komponen ini mengukur jumlah proyek yang secara nyata telah mencapai tahap implementasi sebagai hasil dari koordinasi kerja sama multilateral Indonesia melalui JCM dan AZEC. Untuk tahun 2025, ditetapkan target sebesar 5 komitmen menunjukkan indikasi kesiapan implementasi JCM dan AZEC, baik dari sisi teknis maupun pembiayaan.</p> <p>Dalam kerangka JCM, pelaksanaan proyek didukung oleh berbagai kegiatan koordinasi, termasuk <i>Global Partnership Meeting (GPM)</i> JCM yang mempertemukan para pemangku kepentingan dari negara mitra, serta pengambilan keputusan dalam Rapat <i>Joint Committee (JC)</i> yang menyetujui proyek-proyek ramah lingkungan yang relevan dengan target <i>Nationally Determined Contribution (NDC)</i> Indonesia.</p> <p>Sementara itu, proyek dalam kerangka AZEC dikoordinasikan melalui serangkaian forum dan pertemuan yang mencakup, namun tidak terbatas pada, Pertemuan Tingkat Tinggi AZEC, <i>AZEC Expert Group Meeting (EGM)</i>, dan <i>AZEC Ministerial Meeting</i>, yang menetapkan arah kebijakan dan menyepakati kolaborasi proyek energi bersih. Efektivitas implementasi proyek AZEC juga dinilai dari pencapaian progres menuju <i>financial close</i>, yang menjadi indikator kesiapan proyek untuk direalisasikan di lapangan.</p> <p>Komitmen proyek yang dihitung dalam indikator ini merupakan hasil konkret dari perumusan kebijakan kerja sama ekonomi multilateral yang dikoordinasikan oleh Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral dengan kementerian/lembaga teknis terkait, dengan pelibatan aktif dari mitra internasional dan sektor swasta. Dengan demikian, pencapaian target ini menjadi tolok ukur keberhasilan dalam mewujudkan kebijakan kerja sama multilateral yang strategis dan berdampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya di sektor-sektor hijau dan berorientasi masa depan.</p> <p>Komponen ini dibobotkan sebesar 100% karena pelaksanaan dan pengendalian implementasi proyek JCM dan AZEC merupakan bagian dari tugas dan fungsi utama Asdep KSE Multilateral.</p> <p>Target Implementasi Proyek <i>Joint Crediting Mechanism (JCM)</i> dan <i>Asia Zero Emission Community (AZEC)</i> adalah berupa 5 komitmen, 5 komitmen resmi, yang berasal dari implementasi JCM dan AZEC, termasuk namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Pertemuan <i>Expert Group (EG)</i> dari <i>Asia Zero Emission Community (AZEC)</i>; 2. Keputusan Komite Bersama/<i>Joint Committee Joint Crediting Mechanism (JCM)</i> perihal registrasi, metodologi, dan <i>issuance proyek</i>; Komitmen bersama yang dihasilkan dalam <i>AZEC Ministerial Meeting</i>; 3. <i>Joint Declaration Asia Zero Emission Community (AZEC) Leaders' Meeting</i>; 4. <i>Chairs' Statement</i> dari <i>AZEC Plus Summit on Energy Resilience</i>. 	
	Formula	
	$Capaian (\%) = \frac{Jumlah\ Komitmen}{Targare\ t\ Komitmen\ (5)} \times 100\%$	
	Tujuan	
	Mengukur Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Multilateral melalui Jumlah Komitmen yang Disepakati	
Satuan Pengukuran	Persentase	
Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral	
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral	

Sumber Data	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral		
Tingkat Kendali IKU	(...) High	(X) Moderate	(...) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact	(....) Proxy	(...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(....) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading	(X) Indirect		(...) Direct
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(....) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	80%	100%	90%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	25%	25%	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	50%	50%	40%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	75%	75%	70%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	80%	100%	90%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI KERJA SAMA EKONOMI MULTILATERAL

KODE IKU: 3.1

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Sasaran Strategis	SS.3. Terwujudnya Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral
Deskripsi Sasaran Strategis	Terwujudnya kebijakan kerja sama ekonomi multilateral yang berkualitas merupakan sasaran strategis perspektif <i>internal business process</i> yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif <i>stakeholder</i> . Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: (a) penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional dalam kerja sama ekonomi multilateral; (b) perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional dalam kerja sama ekonomi multilateral; (c) pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional dalam kerja sama ekonomi multilateral; (d) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan kerja sama ekonomi multilateral; dan (e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU 3.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Dokumen <i>Initial Memorandum</i> yang direviu dari komite OECD
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan, yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).</p> <p>Efektivitas tersebut diukur berdasarkan capaian terhadap beberapa sub-komponen utama yang menjadi lingkup Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral. Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait kerja sama ekonomi multilateral, termasuk namun tidak terbatas pada, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Outcomes</i> Pertemuan Tingkat Menteri OECD <i>Outcomes</i> dari Diskusi Menteri-Menteri Hal Progres Tinjauan Teknis <i>Initial Memorandum</i> • <p>Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:</p> <p>Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan</p> <p>Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan</p>

yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan. Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain. Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan;
- Notula/ Risalah/ Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan;
- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan;
- Naskah Urgensi;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Undangan Rapat dan Bahan Rapat Koordinasi dalam rangka mengidentifikasi dan menetapkan ruang lingkup kontribusi K/L terhadap proses revidi *Initial Memorandum*).

Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan perencanaan program;
- Memo Kebijakan;
- Juklak/Juknis;
- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah notula rapat/brief notes/Nota Dinas Laporan atas pembahasan substansi sektor tertentu dalam proses revidi *Initial Memorandum*.

Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

	<ul style="list-style-type: none"> • Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan; • Kertas Kerja Kebijakan; • Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan); • Memo Kebijakan; • Hasil Konsultasi; • Laporan Hasil Evaluasi; • Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah: <p>Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah dokumen jawaban resmi Pemerintah Indonesia atas reviu <i>Initial Memorandum</i> dari Sekretariat OECD yang telah disepakati lintas K/L dan siap disampaikan sebagai bagian dari proses akses Indonesia ke OECD.</p> <p>Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik</p> <p>Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen) • Memo Kebijakan; • Rancangan Kebijakan; • Hasil Konsultasi; <p>Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Siaran Pers oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan/atau Kementerian/Lembaga lainnya atas <i>Initial Memorandum</i> yang di-reviu oleh Sekretariat Tim Nasional OECD.</p>	
	Formula	
	<ol style="list-style-type: none"> Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama $\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20$ Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua $\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25$ Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga $\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5$ Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat Nilai Akhir Persentase Proses Reviu <i>Initial Memorandum</i> dalam Rangka Akses Indonesia ke OECD $\% \text{ efektivitas SKP} = \text{Nilai Tahapan Pertama} + \text{Nilai Tahapan Kedua} + \text{Nilai Tahapan ketiga} + \text{Nilai Tahapan keempat}$ 	
	Tujuan	
	Mengukur tingkat efektivitas dari proses Penyelesaian Reviu <i>Initial Memorandum</i> dalam Rangka Akses Indonesia ke OECD	
Satuan Pengukuran	Persentase	

Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral		
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral		
Sumber Data	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral		
Tingkat Kendali IKU	(...) High	(X) Moderate	(...) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact	(....) Proxy	(...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(....) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct	(X) Indirect	
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
Periode Pelaporan	(....) Bulanan	(X) Triwulanan	(....) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	90%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	10%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	30%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	60%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	90%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI KERJA SAMA EKONOMI MULTILATERAL	KODE IKU: 3.2
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	

Sasaran Strategis	SS.3. Terwujudnya Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral
Deskripsi Sasaran Strategis	Terwujudnya kebijakan kerja sama ekonomi multilateral yang berkualitas merupakan sasaran strategis perspektif <i>internal business process</i> yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif <i>stakeholder</i> . Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: (a) penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional dalam kerja sama ekonomi multilateral; (b) perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional dalam kerja sama ekonomi multilateral; (c) pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional dalam kerja sama ekonomi multilateral; (d) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan kerja sama ekonomi multilateral; dan (e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU 3.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan pada Pertemuan Sherpa Track G20 terhadap Pencapaian Hasil Strategis untuk Kepentingan Nasional
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan, yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).</p> <p>Efektivitas tersebut diukur berdasarkan capaian terhadap beberapa sub-komponen utama yang menjadi lingkup Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral. Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait kerja sama ekonomi multilateral, antara lain, namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>Outcomes dari</i> Rangkaian Pertemuan Sherpa G20 Amerika Serikat; ● <i>Outcomes dari</i> Rangkaian Intersesi Sherpa G20 Amerika Serikat berupa <i>Draft G20 Leaders' Declaration</i> atau Dokumen Tingkat Pemimpin serupa yang dihasilkan oleh Presidensi G20 Amerika Serikat. <p>Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:</p> <p>Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan</p>

Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan. Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain. Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan;
- Notula/ Risalah/ Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan;
- Naskah Urgensi;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Undangan Rapat Koordinasi dan Bahan Rapat Koordinasi dalam rangka mengidentifikasi isu prioritas Sherpa Track, diantaranya adalah Bahan Rapat Koordinasi Pertemuan ke-1 Sherpa G20 dan Penelitian Kepentingan Nasional sebagai Bahan Pertemuan Sherpa G20.

Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan perencanaan program;
- Memo Kebijakan;
- Juklak/Juknis;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Notula Rapat/Brief Notes/Nota Dinas Laporan atas Pembahasan Alternatif Posisi Indonesia dalam forum *Sherpa Track*, diantaranya adalah Bahan Rapat Tindak Lanjut Pertemuan ke-1 Sherpa G20).

Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran

	<p>yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan; • Kertas Kerja Kebijakan; • Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan); • Memo Kebijakan; • Hasil Konsultasi; • Laporan Hasil Evaluasi; • Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah: <p>Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah <i>Talking Points</i>/Kertas Posisi Pemri/<i>Joint Report</i> untuk mendukung posisi Indonesia pada Pertemuan Sherpa G20 dan forum-forum di bawah Sherpa Track G20, diantaranya adalah <i>Talking Points</i> Sherpa G20 Indonesia pada Pertemuan Sherpa ke-2 G20.</p> <p>Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik</p> <p>Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen) • Memo Kebijakan; • Rancangan Kebijakan; • Hasil Konsultasi; <p>Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Siaran Pers atas hasil pertemuan Sherpa G20 Amerika Serikat dan rekomendasi atas strategi posisi nasional.</p>	
	Formula	
	<p>6. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama</p> $\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20$ <p>7. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua</p> $\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 30$ <p>8. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga</p> $\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5$ <p>9. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat</p> $\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5$ <p>10. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan pada Pertemuan Sherpa Track G20 terhadap Pencapaian Hasil Strategis untuk Kepentingan Nasional</p>	

	<i>% efektivitas SKP = Nilai Tahapan Pertama + Nilai Tahapan Kedua + Nilai Tahapan ketiga + Nilai Tahapan keempat</i>		
	Tujuan		
	Mengukur tingkat efektivitas dari proses sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pada Pertemuan Sherpa Track G20 terhadap Pencapaian Hasil Strategis untuk Kepentingan Nasional.		
Satuan Pengukuran	Persentase		
Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral		
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral		
Sumber Data	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral		
Tingkat Kendali IKU	(...) High	(X) Moderate	(...) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact	(....) Proxy	(...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(....) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct	(X) Indirect	
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
Periode Pelaporan	(....) Bulanan	(X) Triwulanan	(....) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	80%	100%	90%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	20%	20%	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	50%	50%	45%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	70%	70%	67,5%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	80%	100%	85%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI KKERJA SAMA MULTILATERAL

KODE IKU: 4.1

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Sasaran Strategis	SS.4 Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang Berkualitas
Deskripsi Sasaran Strategis	<p>Layanan yang berkualitas merupakan layanan yang diselenggarakan secara profesional dan berstandar, dengan orientasi pada kebutuhan pengguna, sehingga mampu memberikan kepastian proses, kemudahan akses, serta hasil layanan yang bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, layanan yang berkualitas ditandai dengan kemampuan penyelenggara layanan dalam merespons kebutuhan, masukan, dan permasalahan pengguna secara cepat, tepat, dan solutif, serta memastikan adanya tindak lanjut yang jelas dan terukur. Pada Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral dalam memberikan fasilitas dan sarana layanan yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral; b) Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral; c) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang-bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral; d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Multilateral..
Indikator Kinerja Utama (IKU)	4.1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral
Deskripsi IKU	Definisi
	Mengukur indikator tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Multilateral dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/ <i>Stakeholder</i> terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:
	Formula
	<p>Mengukur indikator tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/<i>Stakeholder</i> terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:</p> $\text{Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian} = \frac{\sum \text{Rerata jawaban dari masing-masing item survey}}{\text{Jumlah Item Survey}}$ <p>Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk masing-masing unit eselon II, dengan empat kategori penilaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4 B. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50 C. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00 D. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50

	Tujuan		
	Mengukur tingkat kepuasan di proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan kerja sama ekonomi multilateral sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.		
Satuan Pengukuran	Indeks		
Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral		
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral		
Sumber Data	Hasil Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral		
Tingkat Kendali IKU	(...) High	(X) Moderate	(...) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact	(.....) Proxy	(...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(....) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct	(X) Indirect	
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
Periode Pelaporan	(....) Bulanan	(X) Triwulanan	(....) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	3 dari 4	3,78 dari 4	3 dari 4

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI KERJA SAMA MULTILATERAL

KODE IKU: 5.1

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Sasaran Strategis	SS.5. Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang Profesional
Deskripsi Sasaran Strategis	Pelaksanaan tata kelola organisasi yang baik merupakan pengelolaan organisasi yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien melalui kejelasan struktur organisasi, proses bisnis, serta pembagian peran dan tanggung jawab. Tata kelola tersebut bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan secara optimal, berorientasi pada hasil, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara terukur dan berkelanjutan. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang Baik merupakan sasaran kegiatan pada Perspektif Pengembangan Internal yang diturunkan dari sasaran strategis Perspektif Pengembangan Internal pada level kedeputian. Ketercapaian sasaran kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas organisasi, sistem kerja, dan sumber daya pendukung, sehingga mampu mendukung terselenggaranya proses bisnis yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan secara efektif di lingkungan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	5.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral
Deskripsi IKU	Definisi <p>Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.</p> <p>Adapun pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja 2026, Rencana Aksi dan Manual IKU; 2. Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja; 3. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan; 4. Penyusunan Renja 2026; 5. Penyusunan TOR dan RAB atas Revisi Renja 2026; 6. Penyusunan Matriks Manajemen Risiko; 7. Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi; dan 8. Penyusunan Draft Perjanjian Kinerja Tahun 2027.
	Formula
	<p>Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan/atau RB Tematik di Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral.</p> $\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$

	Tujuan		
	Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral.		
Satuan Pengukuran	Persentase		
Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral		
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral		
Sumber Data	Rekapitulasi/tabulasi Data pengumpulan bukti dukung dalam rangka penilaian Reformasi Birokrasi tingkat Kementerian		
Tingkat Kendali IKU	(...) High	(X) Moderate	(...) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact	(....) Proxy	(...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(....) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct	(X) Indirect	
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
Periode Pelaporan	(....) Bulanan	(X) Triwulanan	(....) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	85%	85%	92%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	25%	25%	25%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	50%	50%	45%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	75%	75%	65%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	85%	85%	92%

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
ASISTEN DEPUTI KERJA SAMA EKONOMI MULTILATERAL

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Terwujudnya Dukungan pada Tahapan Akses Indonesia ke OECD	1.1 Persentase Dokumen <i>Initial Memorandum</i> yang selesai proses reuiu dari Komite OECD	30%	Percepatan penyelesaian dokumen <i>Initial Memorandum</i> pada bidang prioritas dalam proses reuiu oleh Komite OECD	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Penyiapan Kuesioner, Pelaksanaan <i>Fact Finding Mission</i>, dan/atau Penyusunan <i>National Action Plan</i> bidang Lingkungan Hidup • Koordinasi Penyiapan Kuesioner, Pelaksanaan <i>Fact Finding Mission</i>, dan/atau Penyusunan <i>National Action Plan</i> bidang Ekonomi Digital 	<ul style="list-style-type: none"> • Menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri OECD • Koordinasi Penyiapan Kuesioner, Pelaksanaan <i>Fact Finding Mission</i>, dan/atau Penyusunan <i>National Action Plan</i> bidang Persaingan Usaha • Koordinasi Penyiapan Kuesioner, Pelaksanaan <i>Fact Finding Mission</i>, dan/atau Penyusunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Penyiapan Kuesioner, Pelaksanaan <i>Fact Finding Mission</i>, dan/atau Penyusunan <i>National Action Plan</i> bidang Investasi • Koordinasi Penyiapan Kuesioner, Pelaksanaan <i>Fact Finding Mission</i>, dan/atau Penyusunan <i>National Action Plan</i> bidang Kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kunjungan Sekjen OECD • Koordinasi Penyiapan Kuesioner, Pelaksanaan <i>Fact Finding Mission</i>, dan/atau Penyusunan <i>National Action Plan</i> bidang Kebijakan Regulasi • Koordinasi Penyiapan Kuesioner, Pelaksanaan <i>Fact Finding Mission</i>, dan/atau Penyusunan <i>National Action Plan</i> bidang

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Penyiapan Kuesioner, Pelaksanaan <i>Fact Finding Mission</i>, dan/atau Penyusunan <i>National Action Plan</i> bidang Fiskal • Koordinasi Penyiapan Kuesioner, Pelaksanaan <i>Fact Finding Mission</i>, dan/atau Penyusunan <i>National Action Plan</i> bidang Perdagangan dan Kredit Ekspor 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>National Action Plan</i> bidang Statistika, • Koordinasi Penyiapan Kuesioner, Pelaksanaan <i>Fact Finding Mission</i>, dan/atau Penyusunan <i>National Action Plan</i> bidang Tata Kelola Usaha • Koordinasi Penyiapan Kuesioner, Pelaksanaan <i>Fact Finding Mission</i>, dan/atau Penyusunan <i>National Action Plan</i> bidang Pasar Finansial • bidang Ekonomi Digital 	<p>Teknologi dan Sains.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Penyiapan Kuesioner, Pelaksanaan <i>Fact Finding Mission</i>, dan/atau Penyusunan <i>National Action Plan</i> bidang Pertanian 	<p>Kebijakan Pengembangan Regional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Penyiapan Kuesioner, Pelaksanaan <i>Fact Finding Mission</i>, dan/atau Penyusunan <i>National Action Plan</i> bidang Edukasi • Koordinasi Penyiapan Kuesioner, Pelaksanaan <i>Fact Finding Mission</i>, dan/atau Penyusunan <i>National Action Plan</i> bidang Manajemen Utang Publik dan Keuangan Berkelanjutan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
						<ul style="list-style-type: none"> an jawaban kuesioner bidang Asuransi dan Dana Pensiun 		<ul style="list-style-type: none">
2.	Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi	2.1 Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Multilateral melalui Jumlah Komitmen Forum Sherpa G20	90%	Penyelesaian Komitmen Forum Sherpa G20	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Internal Posisi Indonesia pada Perundingan Sherpa G20 Bahasan Posisi Nasional untuk isu-isu prioritas Presidensi G20 Amerika Serikat Jaring masukan posisi awal negara G20 pada prioritas Presidensi AS 2026. Rangkaian Perundingan Posisi <i>Energy Abundance Working Group, Innovation Working Group, dan Trade Working Group.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Pertemuan Sherpa ke-2 G20 Presidensi Amerika Serikat Rangkaian Perundingan Posisi <i>Energy Abundance Working Group, Innovation Working Group, dan Trade Working Group.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Pertemuan Sherpa ke-3 G20 Presidensi Amerika Serikat Rangkaian Perundingan Posisi <i>Energy Abundance Working Group, Innovation Working Group, dan Trade Working Group.</i> Pembahasan awal masukan terhadap outcome document KTT G20 c.q. <i>Leaders' Declaration</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Pertemuan Sherpa ke-4 G20 dan KTT G20 Komitmen pada <i>Leaders' Declaration</i> G20 Presidensi Amerika Serikat Komitmen negara anggota dari <i>Outcomes Energy Abundance Working Group, Trade Working Group, Innovation Working Group, dan B20</i> Pertemuan Sherpa ke-1

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
								Presidensi G20 Inggris
		2.2 Tingkat Efektivitas Implementasi Proyek <i>Joint Crediting Mechanism</i> (JCM) dan <i>Asia Zero Emission Community</i> (AZEC)	90%	Penguatan Komitmen Implementasi Proyek <i>Joint Crediting Mechanism</i> (JCM) dan <i>Asia Zero Emission Community</i> (AZEC) melalui <i>debottlenecking</i> dan koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Implementasi JCM melalui <i>Global Partnership Meeting</i> (GPM) • Koordinasi Pelaksanaan 9th <i>AZEC Expert Group Meeting</i> • Pelaksanaan 9th <i>AZEC Expert Group Meeting</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan Tingkat Tinggi AZEC • <i>AZEC Plus Summit on Energy Resilience</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Keputusan <i>Joint Committee</i> (JC) JCM pada <i>Third Party Entity</i> (TPE) • AZEC <i>Ministerial Meeting</i> 2026 • <i>AZEC Leaders' Meeting</i> 2026 	<ul style="list-style-type: none"> • Keputusan <i>Joint Committee</i> (JC) JCM pada Proyek JCM • <i>AZEC 10th Group Meeting</i> (EGM)
3.	Terwujudnya Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral	3.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Dokumen <i>Initial Memorandum</i> yang selesai proses reviu dari Komite	90%	Pelaksanaan Sinkronisasi dan Koordinasi, pelaksanaan Aksesasi OECD Lintas Prioritas dalam Rangka Mewujudkan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dokumen <i>Initial Memorandum</i> yang	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat koordinasi teknis pemenuhan elemen data, jawaban kuesioner, dan persiapan teknis kunjungan lapangan bidang Lingkungan Hidup • Rapat koordinasi teknis 	<ul style="list-style-type: none"> • Rangkaian Persiapan Pertemuan Tingkat Menteri OECD • Rapat koordinasi teknis pemenuhan elemen data, jawaban kuesioner, dan persiapan 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat koordinasi teknis pemenuhan elemen data, jawaban kuesioner, dan persiapan teknis kunjungan lapangan bidang 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Teknis Kunjungan Sekjen OECD • Rapat koordinasi teknis pemenuhan elemen data, jawaban kuesioner, dan persiapan teknis

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
		OECD dalam rangka aksesi Indonesia ke OECD		telah selesai proses reviu dari Komite OECD	<p>memenuhi elemen data, jawaban kuesioner, dan persiapan teknis kunjungan lapangan bidang Ekonomi Digital</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat koordinasi teknis memenuhi elemen data, jawaban kuesioner, dan persiapan teknis kunjungan lapangan bidang Kebijakan Fiskal • Rapat koordinasi teknis memenuhi elemen data, jawaban kuesioner, dan persiapan teknis kunjungan lapangan Perdagangan 	<p>teknis kunjungan lapangan bidang Persaingan Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat koordinasi teknis memenuhi elemen data, jawaban kuesioner, dan persiapan teknis kunjungan lapangan bidang Statistika • Rapat koordinasi teknis memenuhi elemen data, jawaban kuesioner, dan persiapan teknis 	<p>Investasi Ekspor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat koordinasi teknis memenuhi elemen data, jawaban kuesioner, dan persiapan teknis kunjungan lapangan bidang Teknologi dan Sains • Rapat koordinasi teknis memenuhi elemen data, jawaban kuesioner, dan persiapan teknis kunjungan lapangan 	<p>kunjungan lapangan bidang Kebijakan Regulasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat koordinasi teknis memenuhi elemen data, jawaban kuesioner, dan persiapan teknis kunjungan lapangan bidang Kebijakan Pengembangan Regional • Rapat koordinasi teknis memenuhi elemen data, jawaban kuesioner, dan persiapan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					dan Kredit Ekspor	kunjungan lapangan bidang Tata Kelola UsahaEkspor <ul style="list-style-type: none"> • Rapat koordinasi teknis pemenuhan elemen data, jawaban kuesioner, dan/atau persiapan teknis kunjungan lapangan bidang Pasar Finansial 	bidang Pertanian.	teknis kunjungan lapangan bidang Edukasi <ul style="list-style-type: none"> • Rapat koordinasi teknis pemenuhan elemen data, jawaban kuesioner, dan persiapan teknis kunjungan lapangan bidang Manajemen Utang Publik dan Keuangan Berkelanjutan
		3.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian	90%	Penguatan kualitas rekomendasi kebijakan dan komitmen <i>Leaders</i> pada Pertemuan Sherpa Track G20 dalam rangka	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Diseminasi Hasil Sherpa ke-1 G20 Presidensi Amerika Serikat 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Persiapan Pertemuan Sherpa ke-2 G20 Presidensi Amerika Serikat 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Persiapan Pertemuan Sherpa ke-3 G20 Presidensi Amerika Serikat 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Persiapan Pertemuan Sherpa ke-4 G20 • Komitmen pada <i>Leaders'</i>

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
		Kebijakan pada Pertemuan Sherpa Track G20 terhadap Pencapaian Hasil Strategis untuk Kepentingan Nasional		pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan				<i>Declaration</i> G20 Presidensi Amerika Serikat <ul style="list-style-type: none"> Monitoring kesesuaian Komitmen pada <i>Leaders' Declaration</i> G20 dengan Kepentingan Nasional
		3.3 Persentase efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kesepakatan Pembangunan Harmonisasi Kebijakan Energi Bersih pada Joint Crediting	90%	Penguatan kualitas koordinasi dan sinergi dengan <i>stakeholders Joint Crediting Mechanism</i> (JCM) dan <i>Asia Zero Emission Community</i> (AZEC) dalam rangka pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait harmonisasi	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penelaahan kesesuaian proyek JCM dengan regulasi dan kondisi Indonesia Koordinasi atas Implementasi Perpres 110/2026 dan SRUK untuk Proyek JCM Penguatan kualitas koordinasi awal dan penyelarasan pemahaman 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan efektivitas koordinasi dan akselerasi tindak lanjut implementasi proyek dengan <i>stakeholders</i> AZEC Diskusi atas Progres Proyek JCM 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pPenelaahan kesesuaian proyek JCM dengan regulasi dan kondisi IndonesiaOptimalisasi kualitas koordinasi dan pengendalian <i>debottlenecking</i> dengan <i>stakeholders</i> AZEC 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penelaahan kesesuaian proyek JCM dengan regulasi dan kondisi Indonesia Monitoring Proyek JCM dan AZEC Penguatan keberlanjutan koordinasi dan evaluasi kolaborasi dengan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
		Mechanism (JCM) dan Asia Zero Emission Community (AZEC)		kebijakan energi bersih	dengan <i>stakeholders</i> AZEC			<i>stakeholders</i> AZEC
4.	Terwujudnya Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral	4.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral	3 dari 4	Hasil Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Tahun 2026 sebagai dasar penguatan kualitas layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Survey Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Triwulan I sebagai instrumen evaluasi dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Survey Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Triwulan II sebagai instrumen evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Survey Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Survey Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
				dan ketepatan waktu pelaksanaan	perbaikan berkelanjutan kualitas layanan serta ketepatan waktu pelaksanaan	dan perbaikan berkelanjutan kualitas layanan serta ketepatan waktu pelaksanaan	Triwulan III sebagai instrumen evaluasi dan perbaikan berkelanjutan kualitas layanan serta ketepatan waktu pelaksanaan	Triwulan IV sebagai instrumen evaluasi dan perbaikan berkelanjutan kualitas layanan serta ketepatan waktu pelaksanaan
5.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang Profesional	5.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral	92%	Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dan/atau Tematik di lingkungan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral untuk penguatan kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan PK, Manual IKU dan Rencana Aksi • Penyusunan laporan kinerja Triwulan I • Penyusunan Rencana Kerja 2026 • Inisiasi optimalisasi implementasi Srikandi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Tim Kerja dalam rangka memenuhi target kinerja • Penyusunan laporan kinerja Triwulan II • Penguatan implementasi dan pemanfaatan Srikandi dalam proses kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Tim Kerja dalam rangka memenuhi target kinerja • Penyusunan Matriks Manajemen Risiko • Penyusunan laporan kinerja Triwulan III • Monitoring dan pengendalian implementasi Srikandi serta kinerja RB 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Draft Perjanjian Kinerja Tahun 2027 • Penyusunan laporan kinerja Triwulan IV • Evaluasi dan penyempurnaan implementasi Srikandi serta capaian kinerja RB

Jakarta, 31 Januari 2026

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ferry Ardiyanto', written in a cursive style.

Ferry Ardiyanto